

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan laporan aktivitas keuangan dari suatu perusahaan dalam satu periode. Laporan keuangan dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh para pemilik perusahaan. Laporan keuangan juga digunakan untuk memenuhi tujuan-tujuan lain salah satunya yaitu sebagai laporan kepada pihak di luar perusahaan. Pihak-pihak di luar perusahaan biasanya hanya melihat informasi mengenai laba dalam laporan keuangan tanpa mengetahui bagaimana laba itu diperoleh.

Laba merupakan salah satu komponen penting dalam laporan keuangan. Laba yang meningkat jika dibandingkan dengan periode sebelumnya mengindikasikan bahwa kinerja perusahaan telah lebih baik. Informasi laba dapat membantu pemilik atau pihak lain menaksir kekuatan laba perusahaan di masa yang akan datang. Informasi laba ini sering menjadi target rekayasa tindakan oportunistik manajemen untuk memaksimumkan kepuasaannya, tetapi dapat merugikan pemegang saham atau investor (Melai, dkk, 2017).

Tindakan oportunistik tersebut dilakukan dengan cara memilih kebijakan akuntansi tertentu, sehingga laba perusahaan dapat diatur, dinaikkan maupun diturunkan sesuai dengan keinginan. Menurut Artamita (2015) Perilaku manajemen untuk mengukur laba sesuai dengan keinginan ini dikenal dengan istilah manajemen laba. Manajemen merupakan tindakan manajemen untuk mempengaruhi laba yang dihasilkan. Manajemen laba diduga muncul atau dilakukan manajer atau para pembuat laporan keuangan dalam proses pelaporan keuangan suatu organisasi karena mereka mengharapkan suatu manfaat dari

tindakan yang dilakukannya. Manajemen laba merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan, dan menambah bias dalam laporan keuangan, serta dapat mengganggu para pemakai laporan keuangan dalam mempercayai angka-angka dalam laporan keuangan tersebut. Tindakan manajemen laba telah memunculkan beberapa kasus skandal pelaporan akuntansi yang secara luas diketahui. Kasus tersebut terdapat di dalam dan luar negeri, contohnya di Jepang yaitu kasus Toshiba Corporation.

Kasus ini bermula atas inisiatif Pemerintahan Perdana Menteri Jepang yaitu Shinzo Abe yang mendorong transparansi yang lebih besar di perusahaan-perusahaan Jepang untuk menarik lebih banyak investasi asing. Atas saran pemerintah tersebut, Toshiba menyewa panelis independen yang terdiri dari para akuntan dan pengacara untuk menyelidiki masalah transparansi di perusahaannya. Betapa mengejutkannya bahwa dalam laporan 300 halaman yang diterbitkan panel independen tersebut mengatakan bahwa tiga direksi telah berperan aktif dalam menggelembungkan laba usaha Toshiba sebesar ¥151,8 miliar (setara dengan Rp 15,85 triliun / US\$ 1,2 miliar) sejak tahun 2008. Panel yang dipimpin oleh mantan jaksa top di Jepang itu, mengatakan bahwa eksekutif perusahaan telah menekan unit bisnis perusahaan, mulai dari unit personal komputer sampai ke unit semikonduktor dan reaktor nuklir untuk mencapai target laba yang tidak realistis. Panel tersebut mengatakan bahwa Tanaka (CEO Toshiba) dan Sasaki (wakil CEO Toshiba) tidak mungkin tidak tahu atas praktik manipulasi laporan keuangan ini. Saham Toshiba turun sekitar 20% sejak awal April 2015 ketika isu akuntansi ini terungkap. Nilai pasar perusahaan ini hilang sekitar ¥ 1,67 triliun (setara dengan Rp 174 triliun). <https://adnstantiabenedith.wordpress.com>

Kualitas audit merupakan gambaran praktik dan hasil audit atas Laporan Keuangan yang telah dilakukan berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik. Kualitas audit juga merupakan segala kemungkinan dimana seorang auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan ketidaksesuaian yang terjadi dalam sistem akuntansi klien. Dimana pelanggaran yang ditemukan oleh auditor tersebut harus dilaporkan dalam laporan keuangan audit, dengan berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan dalam melaksanakan tugasnya (Artamita, dkk 2015).

Dan fenomena yang terjadi dimasyarakat adalah PT Garuda Indonesia (persero) dan PT KAI. Kinerja keuangan [PT Garuda Indonesia](#) (Persero) yang berhasil membukukan [laba bersih](#) US\$809 ribu pada 2018, berbanding terbalik dari 2017 yang merugi US\$216,58 juta menuai polemik. Dua komisaris Garuda Indonesia, Chairul Tanjung dan Dony Oskaria menolak untuk mendatangi laporan keuangan 2018. Keduanya menolak pencatatan transaksi kerja sama penyediaan layanan konektivitas (*wifi*) dalam penerbangan dengan PT Mahata Aero Teknologi (Mahata) dalam pos pendapatan. Pasalnya, belum ada pembayaran yang masuk dari Mahata hingga akhir 2018. Chairul Tanjung dan Dony Oskaria merupakan perwakilan dari PT Trans Airways selaku pemegang saham Garuda Indonesia dengan kepemilikan sebesar 25,61 persen. Hingga saat ini, polemik laporan keuangan Garuda Indonesia masih terus bergulir. www.cnnindonesia.com

Kasus PT KAI berawal dari pembukuan yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sebagai akuntan sudah selayaknya menguasai prinsip akuntansi berterima umum sebagai salah satu penerapan etika profesi. Kesalahan karena tidak menguasai prinsip akuntansi berterima umum bisa menyebabkan masalah yang sangat menyesatkan. Laporan Keuangan PT KAI tahun 2005 disinyalir telah dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu. Banyak terdapat kejanggalan dalam laporan keuangannya. Beberapa data disajikan tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Hal ini mungkin sudah biasa terjadi dan masih bisa diperbaiki. Namun, yang menjadi permasalahan adalah pihak auditor menyatakan Laporan Keuangan itu Wajar Tanpa Pengecualian. Tidak ada penyimpangan dari standar akuntansi keuangan. Hal ini lah yang patut dipertanyakan. Dari informasi yang didapat, sejak tahun 2004 laporan PT KAI diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang melibatkan BPK sebagai auditor perusahaan kereta api tersebut. Hal itu menimbulkan dugaan kalau Kantor Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan PT KAI melakukan kesalahan. <https://praatiwii.blogspot.com>

Corporate governance adalah tata kelola perusahaan yang sangat penting karena menjadi salah satu mekanisme yang dilakukan dalam upaya pengendalian dan pengelolaan perusahaan. Perlunya menerapkan *Corporate Governance* untuk meminimalisir manajemen yang dianggap tidak efektif dan efisien sehingga berpotensi merugikan pihak lain. *Corporate Governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan (FCGI, 2001). Salah satu fenomena yang terjadi karena kurangnya *corporate governance* dalam perusahaan tersebut contohnya PT Jamsostek.

Badan Pemeriksa Keuangan menemukan beberapa pelanggaran kepatuhan PT Jamsostek atas laporan keuangan 2011 dengan nilai di atas Rp7 triliun. Hal tersebut terungkap dalam makalah presentasi Bahrullah Akbar, anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan dalam diskusi Indonesia Menuju Era Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Bahrullah mengatakan ada empat temuan BPK atas laporan keuangan 2011 Jamsostek yang menyimpang dari aturan. Pertama, Jamsostek membentuk Dana Pengembangan Program Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar Rp7,24 triliun yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah 22/2004. Kedua, Jamsostek kehilangan potensi iuran karena terdapat penerapan tarif program yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pada laporan keuangan 2011, potensi penerimaan Jamsostek yang hilang mencapai Rp36,5 miliar karena tidak menerapkan tarif jaminan kecelakaan kerja sesuai ketentuan. Ketiga, BPK menemukan Jamsostek belum menyelesaikan aset eks investasi bermasalah, yakni jaminan Medium Term Notes (MTN). Adapun aset yang belum diselesaikan adalah tanah eks jaminan MTN PT Sapta Prana Jaya senilai Rp72,25 miliar dan aset eks jaminan MTB PT Volgren Indonesia. Adapun temuan keempat dari BPK adalah masih terdapat beberapa kelemahan dalam pemantauan piutang hasil investasi. Pengendalian dan monitoring PT Jamsostek atas piutang jatuh tempo dan bunga deposito. <https://lilawatyy95.blogspot.com>

Dari kasus–kasus diatas, manajemen melakukan kecurangan, yang berdampak pada ketidakpercayaan *Stakeholder* kepada perusahaan. Salah satu cara untuk memonitor praktik manajemen laba adalah dengan melakukan audit atas laporan keuangan. Dimana dalam hal ini dapat dilihat dari kualitas auditnya, Menurut Sunandar (2014) kualitas audit berpengaruh negatif terhadap praktik manajemen laba. Penyebabnya adalah (1) menggunakan ukuran KAP *big four* yang memiliki kualitas audit tinggi untuk mendeteksi manajemen laba, (2) selain ukuran KAP, semakin tinggi independensi auditor mempengaruhi kerjanya dalam meminimalisir praktik manajemen laba, (3) menggunakan auditor spesialisasi industri yang lebih berpengalaman di bidang industri dalam mendeteksi praktik manajemen laba.

Cara lain yang dapat digunakan untuk memonitor manajemen laba yaitu melihat penggunaan tata kelola perusahaan pada suatu perusahaan. Tata kelola perusahaan dalam hal ini bertujuan untuk menyelaraskan berbagai kepentingan. Menurut Maya Indriastuti (2012) *Corporate governance* merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dengan mendasarkan pada kerangka peraturan.

Pada beberapa penelitian sebelumnya, penulis menemukan perbedaan hasil antara penelitian yang satu dengan yang lain, yaitu penelitian Sunandar (2014) sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hainatun, dkk (2014) yang menyatakan kualitas audit berpengaruh terhadap praktik manajemen laba. Hal tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian Maya (2012), kualitas audit dan *corporate governance* tidak berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Chtourou et al. (2001) dan Midiastuty dan Machfoedz (2003) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berhubungan negatif dengan manajemen laba, sedangkan ukuran dewan direksi berhubungan positif dengan manajemen laba. Dalam penelitiannya, Putri dan Yuyyeta (2012), menyatakan bahwa *corporate governance* dan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Tapi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Agustia (2013) hasil analisis dapat diketahui bahwa kepemilikan manajerial dan kualitas audit tidak mempunyai pengaruh terhadap manajemen laba.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ulang untuk menguji kembali hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya, serta dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, karena sektor manufaktur dominan di Asia, khususnya di Indonesia (Achmad et al., 2009).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, terjadi GAAP antar peneliti sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta menyajikannya dalam sebuah laporan skripsi dengan judul **“Pengaruh Kualitas Audit dan *Corporate Governance* terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar Di BEI periode 2015-2019)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini difokuskan pada permasalahan mengenai:

1. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap manajemen laba?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen laba?
3. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen laba?
4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris berdasarkan hasil kajian dan temuan mengenai :

1. Pengaruh kualitas audit terhadap manajemen laba.
2. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen laba
3. Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap manajemen laba
4. Pengaruh komite audit terhadap manajemen laba

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis
 - a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh kualitas audit dan *corporate governance* terhadap manajemen laba.
 - b. Dapat dijadikan bahan *literatur* dan *referensi* dalam melakukan penelitian selanjutnya mengenai pengaruh kualitas audit dan *corporate governance* terhadap manajemen laba.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya dengan lebih baik agar praktek manajemen laba dapat dihindari. Selain itu, perusahaan dapat menaikkan tingkat kepercayaan para *stakeholder* tidak melakukan manajemen laba.
 - b. Bagi investor dan pemakai laporan keuangan dapat memberi masukan agar lebih mencermati laporan keuangan ketika akan menginvestasikan modalnya.
 - c. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan peneliti ini akan menjadi sumber pengetahuan agar bermanfaat bagi kemajuan pendidikan dan kemajuan dunia usaha.